



**ANALISIS KINERJA PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Sidang Meja Hijau Pada
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh:

RITA ZAHARA HASIBUAN

NPM. 1515310281

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RITA ZAHARA HASIBUAN
NPM : 1515310281
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA PENDAPATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

MEDAN, 03 FEBRUARI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(RAMADHAN HARAHAP, S.E, P.si, M.Si)

DEKAN



(Dr. BAMBANG WIDJANARKO, S.E, M.M)

PEMBIMBING I

(Drs. H. KASIM SIYO, MSi., Ph.D)

PEMBIMBING II

(DR. RAHIMA Br PURBA, SE., MSi., Ak.CA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) Program Studi Sosial Sains jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE, M.M, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Ramadhan Harahap, S.E, P.si, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D, selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan arahan, motivasi, serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rahima br Purba, S.E, M.Si, Ak.CA, selaku dosen pembimbing II yang memberikan banyak masukan dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Akademik yang ada di lingkungan Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat & doa kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya semoga persahabatan kita akan terjalin sampai kapan pun.
9. Rekan-rekan mahasiswa jurusan manajemen yang telah memberi bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Medan, 03 Februari 2021
Penulis

Rita Zahara Hasibuan
NPM. 1515310281

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9

BAB. II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	10
1. Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah.....	10
a. Pengertian Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah....	10
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Pendapatan	11
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Pendapatan	13
2. Analisis Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah.....	14
a. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah	14
b. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.....	17
3. Pemerintah Daerah	20
4. Anggaran Pendapatan Daerah	22
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	22
b. Dana Perimbangan	23
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	24
5. Anggaran Belanja Daerah	25
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	25

7. Prinsip-prinsip Penyusunan APBD	30
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
B. Penelitian Relevan	34
C. Kerangka Berpikir	37
D. Kerangka Konseptual Penelitian	39
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Definisi Operasional Variabel.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Deskripsi Data	44
2. Analisis Data	45
B. Pembahasan	54
BAB. V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Medan	4
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Medan	46
Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Medan	49
Tabel 4.3 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Kota Medan	51
Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Medan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2015-2019	61

ABSTRAK

RITA ZAHARA HASIBUAN. NPM. 1515310281. Analisis Kinerja Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan jika dilihat dari rasio keuangan daerah dan faktor-faktor penyebab turun naiknya rasio keuangan pemerintah Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan dan menyajikan data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data tersebut dianalisis berdasarkan analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari analisis varians pendapatan, kinerja pendapatan pemerintah kota medan tergolong kurang baik karena terdapat selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variances*) pada setiap periode (tahun 2015 sampai 2019). Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, *trend* positif terjadi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan yang negatif. Berdasarkan analisis rasio keuangan daerah, kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan tidak efektif pada kelima periode meskipun terdapat efisiensi pada periode tersebut. 2) Faktor penyebab turun naiknya rasio keuangan daerah pemerintah Kota Medan antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, kurang maksimalnya upaya pemerintah Kota Medan dalam realisasi anggaran dan kurang optimalnya kinerja pemerintah Kota Medan dalam memenuhi target anggaran pendapatan.

Kata Kunci: *Kinerja Pendapatan, Rasio Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

RITA ZAHARA HASIBUAN. NPM. 1515310281. Analysis of Revenue Performance at the Regional Tax and Retribution Management Agency for the City of Medan, Thesis.

This study aims to analyze the revenue performance of the Medan City government when viewed from the regional financial ratios and the factors that cause the fluctuation of the financial ratios of the Medan City government. This research is a quantitative descriptive study by collecting and presenting data on the Realization of the Medan City Regional Revenue and Expenditure Budget from 2015 to 2019. The data is analyzed based on revenue variance analysis, revenue growth analysis and regional financial ratio analysis. The results showed that: 1) From the revenue variance analysis, the revenue performance of the Medan city government was classified as poor because there were unfavorable variances in each period (2015 to 2019). Based on the analysis of revenue growth, positive trends occurred in 2015, 2016, 2017 and 2019. Meanwhile, in 2018 there was negative growth. Based on the analysis of regional financial ratios, the revenue performance of the Medan City government is not effective in the five periods even though there is efficiency in that period. 2) The factors causing the rise and fall of the regional financial ratios of the Medan City government are, among others, the lack of awareness and participation of the public in paying taxes and levies, the less optimal efforts of the Medan City government in budget realization and the less optimal performance of the Medan City government in meeting the revenue budget targets.

Keywords: *Revenue Performance, Regional Financial Ratios.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Dewasa ini telah banyak perubahan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan politik, terutama pasca era reformasi yang berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus segala kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari Perangkat Daerah tersebut.

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan kemandirian keuangan yang lebih baik, pemerintah daerah tidak akan bergantung lagi pada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan pemerintah daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Melainkan, dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Dengan kebijakan sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2018:167), yakni: 1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan; 2) ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya sejak otonomi daerah

diberlakukan, sampai saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kota Medan sebagai salah satu pemerintahan daerah yang tergolong mandiri dalam keuangannya memiliki kinerja pendapatan yang relatif kurang baik. Padahal, seharusnya sebagai pemerintahan daerah yang mandiri, agar mampu melaksanakan kerja-kerja pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah kota Medan harus dapat meningkatkan kinerja pendapatannya. Fenomena ini terlihat dari temuan data mengenai kurang maksimalnya kinerja pendapatan pemerintahan Kota Medan tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Pengukuran ini sekaligus menjadi latar belakang yang mendasari pentingnya untuk melanjutkan analisis kinerja pendapatan pemerintah kota Medan.

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2019.

Varians Pendapatan	Persentase Pertumbuhan	Rasio Efektifitas	Rasio Efisiensi
90,56%	11,88%	90,19%	9,68%

Sumber: Data tahun 2019.

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 varians pendapatan pemerintah kota Medan persentasenya sebesar 90,56%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat selisih yang tidak diharapkan sebesar Rp. 152.638.385.504,00 sehingga jika dilihat dari varians pendapatan, maka kinerja pendapatan pemerintah kota Medan tergolong buruk karena belum mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Dari aspek pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2019 persentase pertumbuhan pendapatan pemerintah kota Medan sebesar 11,88%. Pendapatan

pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 155.456.395.588,00. Hal ini menunjukkan adanya *trend* positif pada kinerja pendapatan pemerintah dari aspek pertumbuhan pendapatan.

Pada tahun 2019, rasio efektifitas pajak daerah pemerintah kota Medan, yang dalam hal ini adalah BPPRD kota Medan, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persentase efektifitasnya sebesar 90,19%. Hal ini tergolong kurang baik karena pajak daerah dikategorikan baik jika persentasenya lebih dari 100%. Selanjutnya, untuk melihat kinerja pendapatan BPPRD kota Medan, dilakukan pengukuran rasio efisiensi pajak daerah. Rasio efisiensi pajak daerah berguna untuk mengetahui perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Kinerja pendapatan dinilai efisien apabila target pendapatan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminim mungkin. Rasio efisiensi pajak daerah dianggap baik apabila persentasenya kurang dari 10%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2019, rasio efisiensi pajak daerah menunjukkan angka 9,68% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pendapatan BPPRD kota Medan tergolong efisien.

Pengukuran kinerja pendapatan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya pendapatan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan dahulunya adalah satu unit kerja yang kecil yaitu sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang

penerimaan/pendataan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan. Namun, seiring dengan dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi pajak/retribusi daerah kota Medan, maka peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan semakin besar saat ini.

Adanya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada lembaga Pemerintahan Kota Medan yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD), karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pendapatannya untuk dinilai apakah lembaga pemerintah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Pendapatan.

Analisis kinerja pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPRD Kota Medan dalam bidang pendapatan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian

tersebut, dianggap penting untuk dilakukan kajian mengenai “Analisis Kinerja Pendapatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan pendeskripsian masalah-masalah yang berkaitan dengan latar belakang, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
2. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Inefisiensi pemerintah dalam melakukan belanja daerah.

Hasil analisis rasio pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan pada penelitian ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja pendapatan jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD, melihat kinerja pendapatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan melihat kinerja pendapatan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD. Dengan digunakannya analisis pendapatan

tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kajian yang di luar penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini berupa “Analisis Kinerja Pendapatan yang dilihat dari aspek Variasi Pendapatan Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Rasio Keuangan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan pada tahun 2015 sampai dengan 2019”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pendapatan pemerintah kota Medan jika dilihat dari keuangan daerah?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya rasio keuangan daerah pemerintah kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja pendapatan pemerintah kota Medan jika dilihat dari rasio keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab turun naiknya rasio keuangan pemerintah kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka akan diperoleh manfaat dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan analisa dan perbaikan di bidang kinerja pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan sehingga kinerja badan tersebut semakin baik dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau sumber relevan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis kinerja pendapatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada era modern yang semakin penuh dengan persaingan ini. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah melalui kegiatan analisis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah

Istilah kinerja pendapatan pemerintah daerah memiliki arti yang sama dengan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, pada bagian ini memaparkan teori-teori mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sumarjo (2018) kinerja pendapatan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Syamsi (2016:199) kinerja pendapatan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kinerja keuangan/pendapatan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan/pendapatan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Menurut Jumingan (2018:239) kinerja pendapatan adalah gambaran kondisi keuangan pendapatan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Ini berarti dalam suatu pemerintahan daerah yang dalam hal ini BPPRD kota Medan, kinerja pendapatan diartikan sebagai gambaran kondisi pemerolehan pendapatan pada suatu periode tertentu yang diukur dengan indikator tertentu. Darise (2018:51) menjelaskan bahwa kinerja pendapatan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Jadi, kinerja pendapatan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan akrual dan diukur dengan menggunakan indikator tertentu.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Pendapatan

Lembaga pemerintahan daerah seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan lembaga publik yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi sedemikian rupa,

maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian lembaga tersebut.

Menurut Jumingan (2018:239) pengukuran kinerja keuangan atau dalam penelitian ini pengukuran kinerja pendapatan memiliki beberapa tujuan seperti: 1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan, pemerolehan pendapatan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya; 2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan paparan mengenai tujuan pengukuran kinerja di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset yang dimiliki. Pengukuran kinerja tersebut juga mampu memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja suatu instansi. Pada penelitian ini, kinerja yang diukur adalah kinerja pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berarti bahwa pengukuran kinerja pendapatan tersebut bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektifitas BPPRD dalam mengelola pendapatan dan mendayagunakan asset yang tersedia sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan kinerja badan tersebut.

c. **Manfaat Pengukuran Kinerja Pendapatan**

Parker (dalam Sadjiarto, 2018) menjelaskan bahwa terdapat lima manfaat dilakukannya pengukuran kinerja pendapatan antara lain: 1) Pengukuran kinerja pendapatan meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil suatu organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja pendapatan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja pendapatan untuk melihat kesuksesan program yang ada;

2) Pengukuran kinerja pendapatan meningkatkan akuntabilitas internal. Adanya pengukuran kinerja pendapatan ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggung jawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*;

3) Pengukuran kinerja pendapatan meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja keuangan organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja pendapatan yang baik; 4) Pengukuran kinerja pendapatan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja pendapatan dan kemampuan

suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai objektif;

5) Pengukuran Kinerja pendapatan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif. Berdasarkan manfaat pengukuran kinerja pendapatan pemerintah daerah di atas, terlihat bahwa pengukuran kinerja pendapatan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu lembaga/organisasi untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

2. Analisis Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kinerja pendapatan yang dimaksud pada penelitian ini memiliki makna yang sama dengan kinerja keuangan sehingga teori-teori yang banyak digunakan adalah teori mengenai kinerja keuangan. Menurut Mahmudi (2018) analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu:

a. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara:

1) Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variansce*).

Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100 \%$$

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan

Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah

diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Berikut ini rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan

$$\text{Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

c) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen.

Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah:

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

d) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung Pendapatan Daerah. Berikut ini rumus untuk menghitung

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Pendapatan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

b. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai dan 2) selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100 \%$$

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100 \%$$

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa:

a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang

lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang.

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

3. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 butir 2 UU 32/04, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi, kemudian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 5 UU 32/04). Andrew dan Colin (2001:3) menjelaskan pentingnya pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota dikarenakan:

- a. Semakin langkanya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan public dalam pembangunan.
- b. Mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah selama ini, sebelum berlakunya Undangundang Nomor 22 dan 25 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 mengarah kepada prinsip bahwa pelaksanaan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. Menurut Koswara (2000:14) berlangsungnya secara bersamaan dua asas pemerintahan tersebut (desentralisasi dan dekonsentrasi) mengartikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab mutlak atas pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini berarti bahwa pertama, ada urusan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya nasional yang tidak diserahkan kepada daerah, baik dalam bentuk otonomi maupun tugas pembantuan. Urusan pembangunan tersebut tetap dikelola oleh pusat atau pejabat perwakilan pusat di daerah. Kedua, pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan jalur intervensi dan pengawasan secara langsung oleh pemerintah pusat terhadap urusan yang sudah diserahkan dan menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Berbeda dengan konsep otonomi daerah yang dianut oleh UU No 32 dan 33 tahun 2004 yang menghendaki pelaksanaan asas desentralisasi secara penuh kepada daerah/kabupaten/kota, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, pengadilan, pertahanan, kegamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis lain. Menurut Gaffar (2002:173),

visi dan konsep otonomi daerah dapat dirumuskan ke dalam tiga ruang lingkup interaksi utamanya, yaitu:

- 1) Bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
- 2) Bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjami lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya.
- 3) Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial.

4. Anggaran Pendapatan Daerah

Halim (2017:99) menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Darise (2008) menggolongkan pendapatan daerah menjadi tiga, yakni:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iurang wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari: a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: hibah/bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada

kabupaten/kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

5. Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda (Darise, 2018:50). Belanja daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu: a) Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur; b) Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum; c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan satu instrument penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan di instansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Elmi (2017:16) menjelaskan bahwa penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Dari pendapat tersebut, definisi penganggaran dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja.
- 2) Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan.
- 3) Alat pengendalian.
- 4) Instrumen publik.
- 5) Disusun dalam periode tertentu.

Tujuan anggaran yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah yang akan dikeluarkan dalam satu periode tahun anggaran dan tujuan anggaran yang lain adalah untuk merinci dari mana penerimaan atau pendapatan diperoleh dan untuk apa pengeluaran dilakukan.

Darise (2018:133) mengemukakan bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah

tertentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan.

Anggaran sebagai alat perencanaan memiliki arti bahwa tujuan serta kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian.

Anggaran sebagai alat pengendalian memiliki arti membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan atas suatu varians, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik.

Di pemerintahan, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran pemerintah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkaran eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

g. Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Dalam penganggaran publik, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

7. Prinsip – prinsip Penyusunan APBD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan APBD adalah:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Prinsip pertama adalah transparan dan akuntabel yang berarti bahwa APBD harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

- b. Disiplin anggaran.

Penyusunan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga anggaran yang disusun harus berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Keadilan anggaran.

Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan pajak dan retribusi secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa ada diskriminasi.

- d. Efisiensi dan efektifitas.

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

- e. Format anggaran.

APBD disusun berdasarkan format anggaran yang defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

f. Rasional dan terukur.

Berarti bahwa dalam aspek pengeluaran mengandung semangat untuk melakukan penghematan.

g. Pendekatan kinerja.

Berarti kualitas kinerja aparatur seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan besar kecilnya alokasi anggaran.

h. Dokumen publik.

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan merupakan dokumen daerah.

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Hal-hal yang dihasilkan dari penjaringan aspirasi masyarakat ini kemudian diformulasikan oleh masing-masing pihak. Pihak eksekutif di samping memperhatikan hasil penjaringan aspirasi, harus pula mempertimbangkan kebijakan yang berskala nasional serta penjabaran tahunan dalam Renstrada. Selain itu, eksekutif juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya juga kapasitas daerah dalam daftar arah dan kebijakan umum daerah, yang kemudian dibahas bersama-sama dengan legislatif untuk mencapai kesepakatan.

Setelah daftar tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka jadilah 'Arah dan Kebijakan Umum Daerah' sebagai dokumen Rencana Tahunan Daerah (Retada) untuk tahun yang akan datang. Dengan dasar dokumen itu, penjabaran

retada tersebut disusun ke dalam dokumen 'Strategi dan Prioritas' sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja yang dijabarkan dalam bentuk rupiah dalam APBD. Dengan demikian, masing-masing satuan kerja sekarang dapat menyusun 'Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)' yang dikenal dengan istilah DUKDA/DUPDA RASK yang merupakan usulan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja.

Setelah kompilasi atau seluruh RASK dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, maka daftar RAPBD disusun guna dibahas di eksekutif dengan seksama. Hasilnya adalah berupa RAPBD yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahasnya, DPRD wajib mensosialisasikan RAPBD tersebut kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung. Masukan-masukan ini dapat berasal dari LSM, mantan pejabat daerah, atau mantan anggota DPRD, dari kalangan Universitas, kemudian didokumentasikan dan ditata dengan rapi dan dilampirkan pada Perda tentang APBD. Beberapa lama sosialisasi berlangsung diserahkan kepada daerah masing-masing, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Setelah melalui pembahasan antara pihak eksekutif dan legislative, maka RAPBD kemudian berubah menjadi APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sedangkan penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Sabeni, 2013:39).

8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, dan belanja bagi hasil serta bantuan keuangan.
 - c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan keuangan yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru, telah ada penelitian-penelitian yang mengkaji hal serupa sebelumnya. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut selanjutnya dijadikan sebagai penelitian yang relevan dengan penelitian yang ini. Penelitian relevan pertama adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Lampa dan Sabijono (2016) berjudul “Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelola Keuangan Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian yang dimuat di Jurnal EMBA ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan Asset dan Pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian daerah, dan efektifitas pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dilihat dari analisis varians dari tahun 2008-2011 belum sepenuhnya tercapai hanya pada tahun 2008 target anggarannya bisa tercapai, sedangkan pertumbuhan pendapatan cukup baik meskipun sempat turun 2% pada tahun 2010. Sebaiknya pimpinan

dinas pengelola keuangan asset dan pendapatan kabupaten Minahasa Selatan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, agar target pajak dan retribusi daerah dapat tercapai.

Penelitian relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Brata dkk (2012) yang berjudul “Analisis Dimensi Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi kinerja pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisa kinerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cirebon. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisa, disimpulkan bahwa dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kota Cirebon memiliki kinerja yang baik karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik dan kinerjanya dilakukan dengan koordinasi yang baik dari setiap lini.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri Tahun Anggaran 2009-2012)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2014) ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kota Kediri jika dilihat dari Rasio Keuangan Daerah. Variabel yang diteliti meliputi rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio aktifitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian terhadap kinerja keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kota Kediri dinyatakan baik, sedangkan rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja

keuangan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kota Kediri

dinyatakan tidak baik.

Penelitian relevan yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2015) yang berjudul “Penilaian Tingkat Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2011-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Boyolali berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan pada periode tahun 2011-2013. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan analisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Boyolali pada tahun 2011-2013 berkisar antara 8,00%-11,06% yang menunjukkan bahwa rasio keuangan daerah instruktif atau kemampuan daerahnya rendah sekali.

Penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas, memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa kesamaannya di antara lain, sama-sama menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja pendapatan. Selain itu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada kinerja pendapatan dengan menggunakan analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan rasio keuangan pendapatan untuk menilai kinerja pendapatan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan. Penelitian relevan tersebut dijadikan sebagai referensi terutama dalam hal pengumpulan data penelitian dan dalam hal analisis data penelitian.

C. Kerangka Berpikir

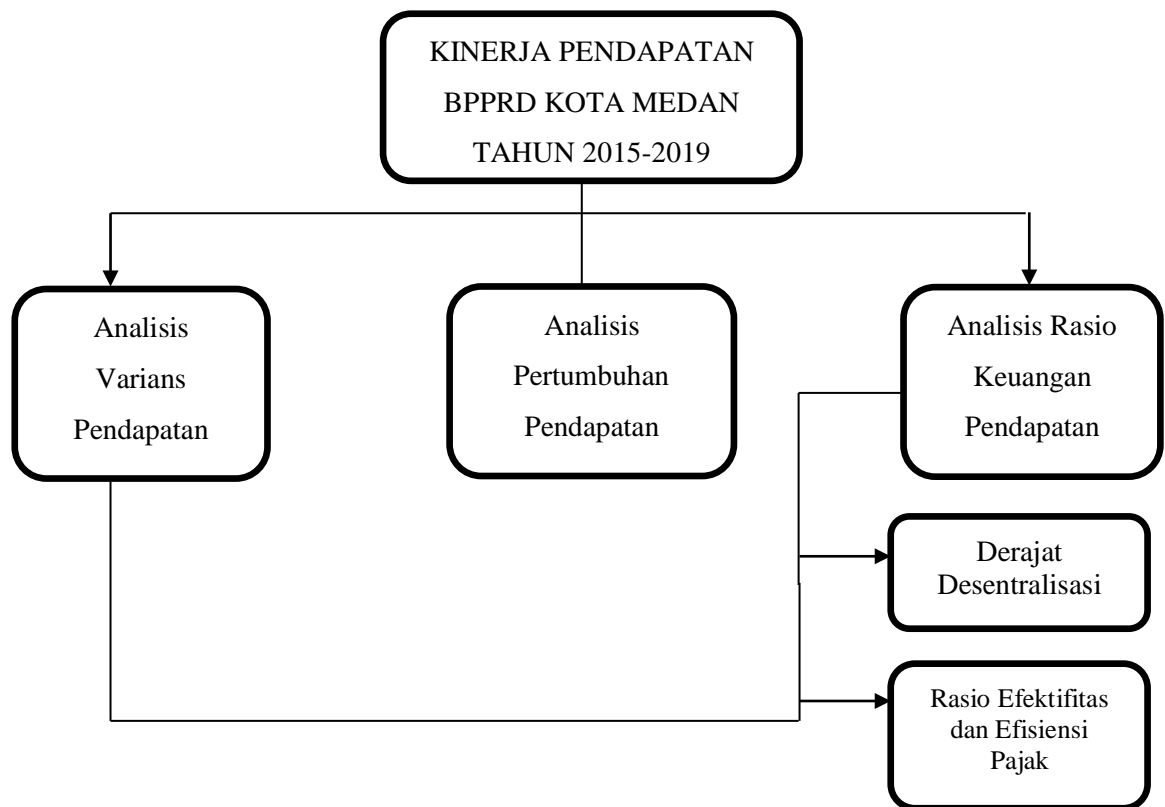
Menganalisis Kinerja Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPRD kota Medan dalam bidang pendapatan untuk kurun waktu tertentu. Berikut dijelaskan rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja pendapatan BPPRD kota Medan: 1) Analisis Varians Pendapatan Daerah. Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh BPPRD. BPPRD dikatakan memiliki Kinerja Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*);

2) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Pendapatannya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya

diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya;

3) Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah. Analisis rasio keuangan pendapatan daerah ini dilakukan dengan menganalisis derajat desentralisasi, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah. Keseluruhan analisis tersebut dilakukan untuk menilai kinerja pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suatu lembaga pemerintah dengan baik.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Suharsimi (2017), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Dalam penelitian ini terdapat perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan pendapatan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan jika dilihat dari analisis varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan rasio keuangan pendapatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang berlokasi di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dan Objek yang diteliti adalah Laporan Keuangan Pendapatan dari tahun 2015-2019.

D. Definisi Operasional Variabel

Kinerja pendapatan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja pendapatan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang pendapatan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional
1.	Kinerja Pendapatan	Kinerja pendapatan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual (Darise, 2018:51).
2.	Pendapatan Daerah	Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Halim, 2017:99).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) dengan metode dokumentasi.

Dokumentasi yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data umum dan data khusus. Data umum terdiri dari gambaran umum kota Medan, gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan. Sedangkan data khusus yang dimaksud pada penelitian ini adalah laporan keuangan pendapatan BPPRD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif sebagai teknik analisis datanya. Teknik ini berarti melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. adapun tolak ukur yang digunakan pada teknik analisis ini adalah:

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah. Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh BPPRD. BPPRD dikatakan memiliki Kinerja Pendapatan yang baik

apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Pendapatannya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya;
3. Analisis rasio keuangan pendapatan daerah yang dilakukan dengan menganalisis derajat desentralisasi, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Adanya otonomi daerah mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada lembaga Pemerintahan Kota Medan yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD), karena itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pendapatannya untuk dinilai apakah lembaga pemerintah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPRD Kota Medan dalam bidang pendapatan untuk kurun waktu tertentu. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Medan adalah data utama pada penelitian ini. Data yang berupa laporan tersebut dianalisis dengan analisis varians, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi dan rasio efektifitas pajak daerah. Data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Medan dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut ini disajikan analisis data yang dilakukan.

2. Analisis Data

a. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Medan

Kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, analisis rasio keuangan pendapatan daerah yang dilakukan dengan menganalisis derajat desentralisasi, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah. Data pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisis data disajikan sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variansce*), sedangkan

selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians Pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{1.002.344.427.216,28}{1.274.122.579.446,00} \times 100 \% \\ &= 78,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{1.135.048.520.750,23}{1.338.127.546.952,00} \times 100 \% \\ &= 84,82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.380.349.594.488,49}{1.392.127.546.952,00} \times 100 \% \\ &= 99,15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.308.458.605.694,00}{1.408.770.116.276,00} \times 100 \% \\ &= 92,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.463.915.001.282,00}{1.616.553.386.786,00} \times 100 \% \\ &= 90,56\% \end{aligned}$$

Tabel 4.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Medan

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Selisih	Varians Pendapatan
2015	1.002.344.427.216,28	1.274.122.579.446,00	(271.778.152.229,72)	78,67%
2016	1.135.048.520.750,23	1.338.127.546.952,00	(203.079.026.201,77)	84,82%
2017	1.380.349.594.488,49	1.392.127.546.952,00	(11.777.952.463,51)	99,15%
2018	1.308.458.605.694,00	1.408.770.116.276,00	(100.311.510.582,00)	92,88%
2019	1.463.915.001.282,00	1.616.553.386.786,00	(152.638.385.504,00)	90,56%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari kelima periode yang diteliti, seluruh periode mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami selisih yang tidak diharapkan. Periode tahun 2015 selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp. 271.778.152.229,72 dengan persentase varians pendapatan

sebesar 78,67%. Periode tahun 2016 selisih yang tidak diharapkan yaitu sebesar Rp. 203.079.026.201,77 dengan persentase varian pendapatan sebesar 84,82%. Pada periode 2017 selisih yang tidak diinginkan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 11.777.952.463,51 dengan persentase varian sebesar 99,15%. Namun, pada periode 2 tahun berikutnya selisih yang tidak diinginkan kembali mengalami peningkatan. Periode tahun 2018 sebesar Rp. 100.311.510.582,00 dengan persentase sebesar 92,88% dan periode tahun 2019, selisih yang tidak diinginkan sebesar Rp. 152.638.385.504,00 dengan persentase varian pendapatan sebesar 90,56%.

Dari deskripsi data di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja pendapatan BPPRD kota Medan jika dilihat dari Analisis Varian Pendapatan tergolong buruk. Hal tersebut karena pada setiap periode dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terdapat selisih yang tidak diinginkan dengan persentase yang cukup jauh dari 100%. BPPRD kota Medan pada kelima periode tersebut (2015-2019) belum mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja pendapatannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan perhitungan berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{1.002.344.427.216,28 - 965.277.820.796,11}{965.277.820.796,11} \times 100 \% \\ &= \frac{37.066.606.420,17}{965.277.820.796,11} \times 100 \% \\ &= 3,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{1.135.048.520.750,23 - 1.002.344.427.216,28}{1.002.344.427.216,28} \times 100 \% \\ &= \frac{132.704.093.533,95}{1.002.344.427.216,28} \times 100 \% \\ &= 13,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.380.349.594.488,49 - 1.135.048.520.750,23}{1.135.048.520.750,23} \times 100 \% \\ &= \frac{245.301.073.738,26}{1.135.048.520.750,23} \times 100 \% \\ &= 21,61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.308.458.605.694,00 - 1.380.349.594.488,49}{1.380.349.594.488,49} \times 100 \% \\ &= \frac{-71.890.988.794,49}{1.380.349.594.488,49} \times 100 \% \\ &= (-5,20\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.463.915.001.282,00 - 1.308.458.605.694,00}{1.308.458.605.694,00} \times 100 \% \\ &= \frac{155.456.395.588}{1.308.458.605.694,00} \times 100 \% \\ &= 11,88\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Medan.

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Pendapatan	Persentase Pertumbuhan
2015	1.002.344.427.216,28	37.066.606.420,17	3,83%
2016	1.135.048.520.750,23	132.704.093.533,95	13,23%
2017	1.380.349.594.488,49	245.301.073.738,26	21,61%
2018	1.308.458.605.694,00	-71.890.988.794,49	(-5,20%)
2019	1.463.915.001.282,00	155.456.395.588	11,88%

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2015, pendapatan Pemerintah Kota Medan mengalami pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 37.066.606.420,17 dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,83%. Pada periode tahun 2016, pendapatan mengalami pertumbuhan positif dengan angka yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 132.704.093.533,95 dengan persentase pertumbuhan sebesar 13,23%. Selanjutnya *trend* pertumbuhan yang positif tetap terjadi pada periode 2017 yang angkanya menunjukkan peningkatan dari dua periode sebelumnya yaitu sebesar Rp. 245.301.073.738,26 dengan persentase pertumbuhan sebesar 21,61%.

Namun, pada periode tahun 2018, realisasi pendapatan mengalami pertumbuhan yang negatif dan bahkan angka yang diperoleh menunjukkan penurunan yang relatif besar yaitu sebesar Rp. -71.890.988.794,49 dengan persentase pertumbuhan sebesar -5,20%. Kemudian pada periode berikutnya, tahun 2019, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif pada persentase pertumbuhan 11,88% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan tersebut sebesar Rp. 155.456.395.588.

3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut rumus untuk menghitung Derajat Desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini adalah BPPRD Kota Medan memiliki sumber pendapatan yang secara keseluruhan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, derajat desentralisasi Pemerintah kota Medan tergolong tinggi. Karena pemerintah Kota Medan memiliki kemampuan menggali dan mengelola pendapatan daerahnya secara mandiri sehingga kemampuannya dalam penyelenggaraan desentralisasi tergolong tinggi.

2) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efektifitas Pajak daerah maka digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektifitas Tahun 2015} = \frac{996.019.808.900,64}{1.267.102.579.446,00} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
&= 78,61\% \text{ Efektifitas Tahun 2016} = \frac{1.125.638.762.947,32}{1.331.127.546.952,00} \times 100 \% \\
&= 84,56\% \text{ Efektifitas Tahun 2017} = \frac{1.370.349.681.442,32}{1.387.127.546.952,00} \times 100 \% \\
&= 98,78\% \text{ Efektifitas Tahun 2018} = \frac{1.298.342.664.660,00}{1.403.770.116.276,00} \times 100 \% \\
&= 92,49\% \text{ Efektifitas Tahun 2019} = \frac{1.453.396.734.450,00}{1.611.553.386.786,00} \times 100 \% \\
&= 90,19\%
\end{aligned}$$

Tabel 4.3 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Kota Medan.

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Rasio Efektifitas
2015	996.019.808.900,64	1.267.102.579.446,00	78,61%
2016	1.125.638.762.947,32	1.331.127.546.952,00	84,56%
2017	1.370.349.681.442,32	1.387.127.546.952,00	98,78%
2018	1.298.342.664.660,00	1.403.770.116.276,00	92,49%
2019	1.453.396.734.450,00	1.611.553.386.786,00	90,19%

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rasio dari kelima periode (tahun 2015-2019) tidak ada yang mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa rasio efektifitas Pajak Daerah Kota Medan belum dapat dikategorikan baik. Pada periode 2015 rasio efektifitas pajak daerah Kota Medan adalah 78,61%. Pada periode tahun 2016 rasio efektifitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,56% namun masih belum dapat dikatakan efektif karena belum mencapai angka 100%. Peningkatan juga terjadi pada periode tahun 2017, rasio efektifitas meningkat menjadi 98,78%. Rasio efektifitas pajak daerah pada periode ini termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan ke empat periode lainnya

karena rasionya hampir mencapai angka 100%. Sementara itu pada periode 2018, rasio efektifitas pajak daerah mengalami penurunan dari periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,49%. Penurunan masih tetap terjadi pada periode tahun berikutnya, tahun 2019, rasio efektifitas pajak daerah sebesar 90,19%. Sehingga secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah BPPRD masih belum dapat dikatakan baik karena tidak mencapai angka 100%.

Selanjutnya, untuk melihat kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan dilakukan pengukuran rasio efisiensi pajak daerah. Rasio efisiensi pajak daerah berguna untuk mengetahui perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Kinerja pendapatan dinilai efisien apabila target pendapatan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini adalah BPPRD Kota Medan. Untuk menghitung rasio efisiensi pajak daerah, maka digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2015} = \frac{107.240.322.277,00}{996.019.808.900,64} \times 100 \%$$

$$= 10,77\% \text{ Rasio Efisiensi Tahun 2016} = \frac{117.510.800.285,00}{1.125.638.762.947,32} \times 100 \%$$

$$= 10,44\% \text{ Rasio Efisiensi Tahun 2017} = \frac{118.100.062.550,00}{1.370.149.681.442,32} \times 100 \%$$

$$= 8,62\% \text{ Rasio Efisiensi Tahun 2018} = \frac{96.178.200.441,00}{1.298.342.664.660,00} \times 100 \%$$

$$= 7,41\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Tahun 2019} = \frac{140.687.858.004,00}{1.453.396.734.450,00} \times 100 \%$$

$$= 9,68\%$$

Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Medan.

Tahun	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah
2015	107.240.322.277,00	996.019.808.900,64	10,77%
2016	117.510.800.285,00	1.125.638.762.947,32	10,44%
2017	118.100.062.550,00	1.370.149.681.442,32	8,62%
2018	96.178.200.441,00	1.298.342.664.660,00	7,41%
2019	140.687.858.004,00	1.453.396.734.450,00	9,68%

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi pajak daerah BPPRD Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada periode tahun 2015, rasio efisiensi pajak daerah sebesar 10,77%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 belum terjadi efisiensi kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan karena rasio efisiensi pajak daerah dianggap baik apabila persentasenya kurang dari 10%. Pada periode tahun 2016, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan dinilai masih belum efisien. Hal ini ditandai oleh rasio efektifitas pajak daerah yang masih di atas angka 10% yaitu 10,44%.

Namun, pada periode tahun 2017, rasio efisiensi pajak daerah mengalami peningkatan. Kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan pada tahun tersebut dinilai efisien karena angka rasio efisiensi pajak daerah sebesar 8,62%. Efisiensi kembali terjadi pada periode tahun 2018 yang ditandai dengan rasio efisiensi pajak daerah sebesar 7,41%. Hingga pada tahun 2019, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan masih dinilai efisien karena angka rasio efisiensi pajak daerah menunjukkan angka 9,68%. Oleh karena itu, secara umum, kinerja pendapatan BPPRD Kota

Medan dalam lima periode (tahun 2015-2019) dapat dikategorikan sebagai kinerja yang efisien.

B. Pembahasan

1. Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Medan yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh BPPRD Kota Medan yang diukur dengan menggunakan analisis varians, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan daerah untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum dapat dikategorikan baik karena masih mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan varians pendapatan daerah Kota Medan, terdapat selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variances*) pada setiap periode dari tahun 2015 sampai 2019 dan selisih yang tidak diharapkan tersebut dapat dikatakan cukup jauh dari 100%. Hal ini berarti bahwa BPPRD Kota Medan belum mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah pendapatan yang dianggarkan (target anggaran). Dari rasio pertumbuhan pendapatan, dapat dilihat bahwa BPPRD Kota Medan mengalami pertumbuhan pendapatan positif pada periode tahun 2015, 2016 dan 2017. Tetapi pada periode tahun 2018, BPPRD Kota Medan mengalami *trend* negatif pada pertumbuhan pendapatan dan bahkan data menunjukkan bahwa angka yang diperoleh mengalami penurunan yang relatif besar. Namun, pada periode tahun 2019, BPPRD Kota Medan kembali mengalami pertumbuhan pendapatan positif jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara itu, dilihat dari efektifitas pajak daerah, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan tergolong tidak efektif. Hal ini terlihat dari rasio efektifitas pajak daerah dari kelima periode (tahun 2015-

2019) tidak ada satu periode pun yang rasionya mencapai angka 100%.

Meskipun pada tahun 2017 rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan angka 98,78%, namun hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai efektif karena tidak mencapai angka 100%. Selanjutnya berdasarkan rasio efisiensi pajak daerah, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan tergolong tidak efisien pada periode tahun 2015 dan 2016 karena rasio yang ditunjukkan masih melebihi angka 10%. Namun, pada periode berikutnya, yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan tergolong efisien karena rasio yang ditunjukkan berada pada angka di bawah 10%.

2. Naik turunnya rasio keuangan daerah pemerintah Kota Medan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Berdasarkan varians pendapatan daerah Kota Medan, terdapat selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variances*) pada setiap periode dari tahun 2015 sampai 2019. Hal ini terjadi karena realisasi pendapatan BPPRD Kota Medan masih jauh dari jumlah pendapatan yang ditargetkan (anggaran pendapatan). Faktor penyebabnya adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi masih kurang sehingga realisasi anggaran tidak sesuai target. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penyuluhan dan himbauan akan pentingnya pajak demi kemajuan daerah sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.
- b. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, BPPRD Kota Medan mengalami pertumbuhan pendapatan positif pada periode tahun 2015,

2016 dan 2017. *Trend* negatif terjadi pada periode tahun 2018 bahkan angka yang diperoleh mengalami penurunan yang relatif besar. Namun, pada periode tahun 2019 kembali mengalami pertumbuhan pendapatan positif. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut masih berkaitan dengan kurang maksimalnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang sesuai dengan target anggaran. Solusi yang ditawarkan terkait permasalahan ini adalah perlunya inisiatif dan kemauan pemerintah daerah dalam memaksimalkan realisasi pendapatannya. Salah satu upaya riil yang bisa dilakukan misalnya dengan mendirikan BUMD sector potensial.

- c. Berdasarkan rasio efektifitas pajak daerah, kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan kurang efektif namun ditinjau dari segi rasio efisiensi, kinerjanya tergolong efisien. Kurangnya efektifitas kinerja karena realisasi pendapatan belum mencapai 100% anggaran yang ditargetkan. Oleh karena itu, BPPRD Kota Medan dinilai perlu mengoptimalkan kinerjanya agar mampu mencapai realisasi pendapatan sesuai dengan target anggaran atau bahkan melampauinya. Dari aspek efisiensi, BPPRD Kota Medan dari tiga periode terakhir (2017, 2018 dan 2019) menunjukkan efisiensi kinerja yang baik. Hal ini berarti bahwa pendapatan pajak daerah yang terealisasi lebih besar daripada biaya pemerolehannya. Oleh karena itu, BPPRD Kota Medan diharapkan untuk tetap konsisten dalam menjaga tingkat efisiensi kinerjanya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan yang diukur dengan analisis varian pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan (dalam hal ini BPPRD Kota Medan) dilihat dari analisis varians pendapatan tergolong kurang baik karena masih terdapat selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variances*) pada setiap periode (tahun 2015 sampai 2019). Dari analisis pertumbuhan pendapatan, kinerja pemerintah Kota Medan mengalami *trend* pertumbuhan yang positif pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019. Namun, pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan mengalami *trend* negatif. Selanjutnya, ditinjau dari analisis rasio keuangan daerah, kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan tergolong tidak efektif pada kelima periode pengukuran (2015-2019) meskipun kinerja pendapatan BPPRD Kota Medan tergolong efisien jika ditinjau dari rasio efisiensi pajak daerah.
2. Faktor-faktor penyebab turun naiknya rasio keuangan daerah pemerintah Kota Medan antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Upaya pemerintah Kota Medan yang kurang maksimal dalam merealisasikan pendapatan yang sesuai dengan target anggaran pendapatan. Kurang optimalnya kinerja pemerintah kota Medan dalam memenuhi target anggaran pendapatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan perlu mengoptimalkan kegiatan penyuluhan maupun himbauan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah Kota Medan yang dengan upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga berujung pada meningkatnya pendapatan pemerintah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan kinerja pendapatannya dengan jalan meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam kinerja tersebut, baik dengan jalan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan maupun dengan merekrut pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, pemerintah Kota Medan juga perlu mengembangkan BUMD yang ada atau bahkan mendirikan BUMD yang potensial untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Kota Medan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan analisa kinerja pendapatan yang lebih rinci agar hal-hal yang tidak terkaji dalam penelitian ini dapat terkemuka sehingga hasil penelitian mampu memberikan penilaian serta alternatif solusi untuk peningkatan kinerja pendapatan pemerintah Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Y.K. 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja
- Darise, N. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Halim, A. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2018. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. Metode Penelitian. USU Press. Medan
- Jumingan. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, M.A. 2015. Penilaian Tingkat Kinerja
- Mohamad, M. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahardjo, A. 2011. *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sembiring, R. (2019). Teori Dasar Ekonomi. CV. Andalas Bintang Ghonim. Jakarta
- Suharsimi, A. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syamsi, I. 2016. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.

JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. Business and Management Horizons, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). *“Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”*. Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Brata, Y.A., dkk. 2012. Analisis Dimensi Kinerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. *Jurnal FISIP Universitas Diponegoro*. 1(1).

- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Jendra, T. 2012. Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*. 2(1). hlm. 595-715.
- Lampa, L & Sabijono, H. 2016. Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 4(1) hlm. 056-066.
- Lubis, AIF (2018). Strategi Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Kesejahteraan Melalui Teknologi Pemberdayaan Masyarakat. *Int. J.Civ. Ind. Teknologi* , 9 (9), 1036-1046.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. Jumant, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 9(2), 1-13.
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publikdan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- Sadjiarto, A. 2018. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Universitas Kristen Petra.
- Sembiring, R. (2018). Pengaruh Nilai Tukar Nelayan (Pendapatan Nelayan, Pendapatan Non Nelayan, Pengeluaran Nelayan, Pengeluaran Non Nelayan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kondisi Fisik Rumah) di Desa Pahlawan. *Jurnal Abdi Ilmu*, 10(2), 1836-1843
- Sembiring, R., & Faried, A. I. (2019). Productivity Analysis and Welfare of Salt Farmers in Tanoh Anoe Village, Bireun-Indonesia. *IC2RSE2019*, 290.

- Sembiring, R., & Faried, A. I. Community In The Bireun Regencyfishing Village.
- Sembiring, R. (2018). Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. *JEpa*, 3(1), 75-82
- Sembiring, R.,(2019) Nasution, L. N., Faried, A. I., & Novalina, A. Determinant of Human Development Index (HDI) Towards Poverty in the Regency/City of North Sumatera Province (Case Study Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, and Pematang Siantar).
- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.*
- Sumarjo, H. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. 1(1).
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi.*